

disahkan dalam akta nomor 23, tanggal 16 April 2008 di notaris Wachid Hasyim SH. Serta menteri Hukum dan Ham nomor AH4.2445.AH.01.02 tanggal 12 juni 2008. Pada perombakan kepengurusan yayasan (menyesuaikan dengan undang-undang yang baru (2013-2018), telah melibatkan anggota baru yang direkrut dari jamaah Masjid An-Nur Rewwin untuk menjadi bagian dari kepengurusan yayasan dengan harapan: “Semoga nantinya akan tumbuh dan selalu tumbuh angkatan-angkatan baru yang lebih muda, lebih mumpuni, lebih islami serta lebih peduli ”

Dalam melaksanakan kegiatan yayasan An-Nur Rewwin dibentuklah kepengurusan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Ketakmiran (Pengelola kegiatan Masjid) yang mana meliputi kajian Ahad petang (ba'da sholat maghrib), ahad ba'da sholat isya' belajar bahasa arab untuk mempermudah membaca Al-Qur'an, jum'at ba'da isya belajar membaca Al-Qur'an, kultum (ceramah setiap ahad ba'da sholat subuh), menerima / menyalurkan zakat fitrah dan kurban serta bekerjasama dengan rukun tetangga sekitar sebagai koordinator panitia pelaksana.
- b. Bidang Pendidikan (pengelola TPQ dan madrasah diniyah (Madin). Ijin pendirian Madin dari Departemen Agama RI Kabupaten Sidoarjo Nomor: Kd. 13.15/5/PP.008/2033/2007, tanggal: 20 Juni dengan 32 statistic nomor: 412351514234. Saat ini (tahun ajaran 2013/2014) santriwan/santriwati berjumlah 70 orang yang mana dibimbing oleh 5 ustadzah.

- c. Bidang Kewanitaan (mengkoordinir kegiatan ibu-ibu) meliputi baksos (bakti sosial), kajian Jum'at petang (ba'da sholat maghrib), Jum'at ba'da sholat isya' belajar terjemah Al-Qur'an beserta isinya, Rabu ba'da isya' belajar menyulam (hasil karya telah laku dijual dan diikuti pameran).
- d. Bidang Pembangunan (melaksanakan pembangunan gedung madin TPQ beserta fasilitasnya dengan RAB Rp. 2.600.000).
- e. Bidang Usaha Dana (mengelola *infaq* dari donatur rutin tiap-tiap RT dan dengan membuat iklan yang ada di buku khotbah milik Masjid An-Nur untuk menunjang kegiatan yayasan seta turut serta mengelola usaha *Baitul Māl Wat Tamwil* (BMT An-Nur Rewwin).
- f. Bidang Kepemudaan (mengkoordinir kegiatan Ikatan Remaja Masjid/IRMA) yang mana hanya diikuti oleh remaja putri untuk mengkader generasi muda agar menjadi generasi muda yang islami yang berimtaq tinggi. Kegiatan-kegiatan IRMA diantaranya adalah baksos (bakti sosial) yang diadakan setiap bulan ramadhan setiap bulan ramadhan, donor darah setiap tiga bulan sekali, parade An-Nur (pentas seni) setiap tiga bulan sekali.

Yayasan An-Nur Rewwin bergerak di bidang usaha dana yang hanya mengandalkan dana dari donatur serta membuat iklan pada buku khotbah di Masjid An-Nur Rewwin untuk melakukan perawatan Masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di Masjid. Jamaah Masjid An-Nur Rewwin berencana untuk mengembangkan suatu usaha agar yayasan An-Nur Rewwin memiliki pemasukan tambahan.

Pembukaan suatu usaha di dalam yayasan An-Nur Rewwin diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan Masjid, sehingga Masjid tidak lagi bergantung dari dana donatur atau pembuatan iklan khotbah untuk biaya perawatan maka dibentuklah suatu usaha koperasi syariah yang berada di dalam yayasan pada bidang usaha dana milik Masjid An-Nur Rewwin. Pembentukan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 bertempat di Masjid yang dihadiri dan disetujui oleh beberapa pengurus Masjid An-Nur Rewwin.

Pengurus koperasi serba usaha An-Nur Rewwin melakukan studi banding di bidang koperasi yang mana untuk melatih serta mengetahui bagaimana pola kerja koperasi di beberapa daerah seperti di Malang, Probolinggo dan Tulungagung. Dari studi banding tersebut telah banyak didapatkan ilmu tentang keorganisasian dan cara pengelolaan secara syariat Islam maka koperasi serba usaha diganti dengan *Baitul Māl Wat Tamwil* atau BMT.

Dalam menghimpun modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 600.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00. Setelah usaha tersebut dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang digunakan untuk operasional masih menyewa dan belum menjadi kepemilikan oleh BMT An-Nur Rewwin.

penyebaran brosur, mensponsori kegiatan Masjid, memberitahukan saat rapat dan sebagainya.

- d. Bapak Bambang Waluyojati sebagai bendahara bertugas untuk merealisasi pembiayaan serta menerima pembayaran dari nasabah baik berupa pembayaran pembiayaan maupun penyimpanan.
- e. Bapak Deni sebagai *official* bertugas untuk penerima berkas serta anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 diputuskan untuk menambah anggota pengurus di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, dengan tujuan untuk memabantu kelancarandalam kepengurusan BMT yang semakin lama semakin berkembang. Adalah Bapak Nur Kholis sebagai admin yang bertugas sebagai administrator yang tidak jauh berbeda dengan bapak Bambang Waluyojati, yang bertugas untuk merealisasi pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta pembukuan keuangan di BMT An-Nur Rewwin. Dewan Pengawas Syariah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Drs. H. Akhmad Mukarram M.Hum (Sebagai Ketua)
- b. Ir.H.M. Nadjikh (Sebagai Anggota)
- c. Drs. H. Achmadi Joedhono (Sebagai Anggota)
- d. Drs. H. Djoko Poerwantoro M.Pd (Sebagai Anggota)

Dari hasil wawancara dengan wakil ketua BMT An-Nur Rewwin Bapak Yudi Budiman beliau mengatakan bahwa sebagai langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT menanyakan tentang usaha yang akan dijalankan maupun yang telah dijalankan. Setelah itu pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota karena hal ini penting yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapkan berapa bagi hasil yang nantinya akan dibagikan antara BMT dengan anggota. Jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT adalah sesuai dengan kesepakatan dan banyaknya jumlah pinjaman.

Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan BMT An-Nur Rewwin menawarkan beberapa *nisbah* yang mana nantinya akan diterima kedua belah pihak BMT dan calon anggota. *Nisbah* yang ditawarkan adalah sesuai dengan prosentase prakiraan laba usaha per hari anggota dan biasanya taksiran *nisbah* ini diambil dari prosentase laba terkecil dari suatu usaha. Selanjutnya terjadilah suatu tawar menawar mengenai berapa bagi hasil dan nisbah keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama. Setelah *nisbah* disepakati selanjutnya BMT An-Nur Rewwin membahas tentang angsuran yang nantinya diangsur oleh anggota.

Adapun sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dapat dilihat dari contoh

Mushārahah atau *shirkah* pada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ini adalah termasuk *shirkah 'inān*. Karena modal yang diberikan BMT kepada nasabah bukanlah modal utama usaha, namun sebagai modal pengembangan usaha. Mayoritas nasabah yang melakukan peminjaman adalah dikarenakan kebutuhan atau tidak adanya pilihan lain untuk mendapatkan dana sebagai pengembangan usaha.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang telah melakukan pinjaman adalah untuk usaha kecil yang bersifat menguntungkan (makro) yang mana nasabah harus membayar bagi hasil untuk BMT. BMT juga melakukan perhitungan *nisbah* bagi hasil (40:60) sesuai kesepakatan anggotanya. Namun nisbah tersebut terkadang memberatkan nasabah jika BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak melakukan perhitungan sesuai laba usaha selah diawal bulan sesuai perputaran keuntungan yang dihasilkan anggota. Pendapatan tetap diawal prakiraan usaha adalah patokan paten dari BMT An-Nur Rewwin untuk menentukan bagi hasil pembiayaan *mushārahah*.

Jika terdapat kredit macet pada pembiayaan *mushārahah*, pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke BMT. Selanjutnya nasabah akan dimintai keterangan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal kesepakatan pembiayaan *mushārahah*. Selanjutnya BMT akan memberikan opsi pembayaran ditempat atau memberikan tenggang waktu pembayaran serta pelelangan terhadap jaminan pembiayaan.

